



PERKEMBANGAN KOTA BENGKALIS ERA REFORMASI (1998-2020)

DEVELOPMENT OF THE CITY OF BENGKALIS IN THE REFORM ERA (1998-2020)

Rona Cahyati Simanulang^{1✉}, Bunari², Asril³

^{1 2 3} ✉ Universitas Riau

E-mail: rona.cahyati2990@student.unri.ac.id[✉], bunari@lecturer.unri.ac.id, Asril.unri@gmail.com

Diterima: 20 Januari 2023

| Direvisi: 27 Maret 2023

| Diterbitkan: 30 Maret 2023

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Bengkalis,
Era,
Reform.

Bengkalis City is located on Bengkalis Island, which is the capital of Bengkalis Regency in Riau Province, where most of its administrative area is on the island of Sumatra. In this regard, Bengkalis City is always crowded with people from the island of Sumatra for government affairs, both government agency permits and other legal documents. The purpose of this study is: (1) to find out how the condition of Bengkalis City was at the beginning of the reform. (2) To find out how the social, economic, and educational conditions of Bengkalis City were from 1998–2020. (3) To find out the driving and inhibiting factors for the development of Bengkalis City in 1998–2020. This research is historical. Data were collected through archive study methods, interviews, and documentation. Data analysis techniques use four components of analysis: data compilation, data classification, data processing, and analyzing and interpreting the results. The result of this research is the beginning of reform. Bengkalis District is still lagging. However, after the 1999 Regional Autonomy Law was enacted to manage their households, Bengkalis City began to develop, and the population of Bengkalis City continued to grow from 1998 to 2020. The construction of three ports (domestic and international) could both boost the economy and become an impediment because these ports were the exit points for entry into the City of Bengkalis.

Kata Kunci:

Bengkalis,
Era,
Reformasi.

Kota Bengkalis terletak di Pulau Bengkalis yang merupakan ibu kota Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau yang sebagian besar wilayah administrasinya berada di pulau Sumatera. Dalam hal ini, Kota Bengkalis selalu ramai dikunjungi masyarakat dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan, baik perizinan instansi pemerintah maupun dokumen legal lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana kondisi Kota Bengkalis pada awal reformasi. (2) Untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan Kota Bengkalis tahun 1998–2020. (3) Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat perkembangan Kota Bengkalis tahun 1998–2020. Penelitian ini bersifat historis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi arsip, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan empat komponen analisis: kompilasi data, klasifikasi data, pengolahan data, dan analisis serta interpretasi hasil. Hasil penelitian ini merupakan awal dari reformasi. Kabupaten Bengkalis masih tertinggal. Namun setelah UU Otonomi Daerah 1999 diberlakukan untuk mengatur rumah tangganya, Kota Bengkalis mulai berkembang, dan penduduk Kota Bengkalis terus bertambah dari tahun 1998 hingga 2020. Pembangunan tiga pelabuhan (domestik dan internasional) sama-sama dapat mendongkrak perekonomian dan menjadi kendala karena pelabuhan-pelabuhan tersebut merupakan pintu keluar untuk masuk ke Kota Bengkalis.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang hanya sekitar 7.000 yang berpenghuni. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan memiliki 514 kabupaten dan kota. Kata bahasa Indonesia “kota” berasal dari bahasa sanskerta yaitu “koeta” yang artinya perbentengan. Secara etimologis “kota” adalah suatu daerah pemukiman dan bangunan-bangunan yang merupakan tempat kediaman (Sedyawati, 1994). Jadi kota merupakan tempat bermukim warga kota, tempat bekerja tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan sebagainya. Melihat beberapa definisi kota di atas, terlihat adanya perbedaan pandangan mengenai definisi kota, terutama dari segi fisik, kependudukan dan demografi.

Gerakan reformasi berlangsung di seluruh Indonesia, dimulai dengan diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Pasal 2 berdampak pada pembentukan daerah otonom baru. Otonomi daerah membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah (Gusri, 2005). Gerakan reformasi 1998 menjadi bagian dari NKRI dan jalan negara mewujudkan cita-cita Deklarasi 1945 (Suparno, 2012). Reformasi muncul sebagai respon terhadap krisis yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum dan sosial menjadi faktor yang melatarbelakangi lahirnya gerakan reformasi.

Kota Bengkalis terletak di Pulau Bengkalis yang merupakan Ibukota Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau yang sebagian besar wilayah administrasinya berada di pulau Sumatera. Dalam hal ini, Kota Bengkalis selalu ramai

dikunjungi masyarakat dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan, baik perizinan instansi pemerintah maupun dokumen legal lainnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2002).

Kota Bengkalis yang juga merupakan ibukota kabupaten juga dapat merasakan dampak reformasi, terutama dengan mulai dirasakannya perkembangan perkotaan, sosial, ekonomi dan pendidikan yang diterima pasca reformasi. Letak Kota Bengkalis sangat strategis, terletak di tepi jalur pelayaran internasional yakni Selat Malaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (Pemprov Riau, 2021).

Perkembangan Kota Bengkalis berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan sudah terasa sejak awal reformasi pada tahun 1998 ketika pelabuhan penyeberangan Ro-ro Bengkalis mulai menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Pulau Sumatera. Fungsi utama pelabuhan ini adalah untuk menghubungkan Kota Bengkalis dengan kota-kota lain di Pulau Sumatera (Lazuardy & Rahmani, 2018).

Setelah dibangunnya pelabuhan penyeberangan Ro-ro Bengkalis ini menjadi salah satu penunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis. Di pelabuhan ini ada kapal ferry/kapal Ro-ro yang mengangkut kendaraan (mobil, motor, truk dan lain-lain) dan orang-orang yang ingin menyeberang dari Pulau Bengkalis ke Sungai Pakning dan begitu pula sebaliknya. Perekonomian Bengkalis beranjak naik dan stabil dikarenakan perekonomian Bengkalis terus berjalan dari hari kehari hingga tahun ke tahun.

Pelabuhan besar di Pulau Bengkalis ada 2 (dua) yaitu pelabuhan utama Bandar Sri Laksamana yang berada di Ibukota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, melayani rute dalam negeri dari Kota Bengkalis ke Dumai, Pekanbaru, Selatpanjang (Kabupaten Kepulauan Meranti), Tanjung Balai Karimun, dan Tanjungpinang (Provinsi Kepulauan Riau).

Selain Pelabuhan Bandar Sri Laksamana ada pula Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia, terletak persis di jalur utama jalur perdagangan internasional tersibuk, yaitu Selat Malaka. Keberadaan pelabuhan Bandar Sri Setia Raja Selatbaru dapat memberikan dorongan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di Kabupaten Bantan atau Bupati Bengkalis, tetapi juga di Provinsi Riau lainnya (Pemkab Bengkalis, 2011).

Seiring berjalannya waktu dan dengan bertambahnya penduduk Kota Bengkalis setiap tahunnya, fasilitas pendidikan pun mulai dibangun. Pemerintah Kota Bengkalis mulai membangun sekolah-sekolah formal, sekolah non-formal, dan sekolah informal baik negeri maupun swasta. Untuk perguruan tinggi yang berada di Pulau Bengkalis, ada sebanyak 3 perguruan tinggi yaitu: STAIN Bengkalis, STIE Bengkalis, dan Politeknik Bengkalis. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang “Perkembangan Kota Bengkalis Era Reformasi (1998-2020)” terutama ingin mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat Kota Bengkalis.

METODE

Pada kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah (historis). Menurut Wasino dan Endah Sri Hartatik dalam buku (Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan) metode sejarah adalah suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil yang pada umumnya dalam bentuk tertulis dari hasil-hasil yang dicapai (Wasino & Hartatik, 2018).

Untuk memperoleh data yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan gambaran dari permasalahan secara menyeluruh peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kearsipan, dokumentasi, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONDISI KOTA BENGKALIS SEBELUM DAN AWAL REFORMASI 1998

Lahirnya era baru yaitu era reformasi pada tahun 1998, ditandai dengan berakhirnya rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun yaitu rezim orde baru. Pada era reformasi terjadi banyak perubahan baik di dalam bidang aturan hukum maupun aturan Perundang-undangan yang merupakan perwujudan dalam suatu bangsa maupun negara. Kondisi Kota Bengkalis sebelum dan awal reformasi cenderung tertinggal baik dari segi infrastruktur, transportasi, dan juga teknologi. Pada saat itu mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, terutama yang bertempat tinggal di pesisir

pantai. Pada bidang pertanian, produksi panen seperti padi, jagung, ubi rambat, kacang tanah, dan kacang hijau cenderung rendah. Hal ini karena pengelolaan lahan rawa menjadi lahan pertanian masih belum banyak dilakukan.

PROSES PERKEMBANGAN KOTA BENGKALIS PASCA REFORMASI

Proses perkembangan kota tentunya memiliki proses yang panjang, penataan dan pembangunan pada bidang infrastruktur tentunya akan menjadi hal yang terpenting dalam perkembangan kota dikarenakan infrastruktur menjadi faktor utama untuk menunjang jalannya perekonomian suatu daerah. Aspek ekonomi, sosial, politik, wisata, dan pendidikan juga menjadi hal penting dalam perkembangan suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari tujuan anggaran yang ditetapkan pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam konteks sosial, keberadaan masyarakat di Kota Bengkulu tidak mengalami disintegrasi sosial antara suku dan agama. Mayoritas masyarakat hidup dalam kedamaian dan rukun sesama antar warga dan tidak pernah terjadi peperangan antar etnis seperti di kota lain. Sedangkan dalam konteks ekonomi, anggaran dana yang masuk ke daerah sudah diatur sendiri oleh daerah dan dana tersebut cukup besar, maka pembangunan daerah mulai digerakkan untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Bengkulu terkhususnya Kota Bengkulu sendiri dikarenakan pusat pemerintahan yang berada di Pulau Bengkulu yang beribukotakan Kota Bengkulu.

Pengelolaan otonomi daerah yang mandiri berpengaruh pada tindakan pemerintah yang

bisa memakmurkan rakyatnya. Adanya pemasukan kota dapat mencukupi untuk pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat baik yang kabupaten, kota, desa bahkan pelosok daerah. Penduduk Kota Bengkulu juga berasal dari masyarakat pendatang.

Banyaknya pendatang tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat yang mulai merambah ke bidang perdagangan dan jasa. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Bengkulu berupaya meningkatkan kualitas penduduk dengan memperluas bidang pendidikan dan kesehatan yang ada di Kota Bengkulu. Pendidikan di Kota Bengkulu semakin berkembang, terutama setelah menerapkan banyak kebijakan seperti magang di Taiwan dan beasiswa untuk siswa dan guru berprestasi.

KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN KOTA BENGKALIS TAHUN 1998-2020

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan bagian dari gerakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dan regenerasi, terkhususnya di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan sejak krisis moneter pertengahan tahun 1997. Indonesia menghadapi inflasi yang signifikan. Akibatnya, pembangunan ekonomi terhambat, dan pendapatan per kapita menurun sejak 1998.

Penduduk menjadi komponen utama dalam upaya pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu, jumlah penduduk pada 23 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penduduk Kabupaten Bengkulu memiliki

suku dan agama yang heterogen. Mayoritas penduduknya beragama Islam, dan mayoritas berasal dari suku Melayu. Selain suku melayu, penduduk Kabupaten Bengkalis juga berasal dari berbagai suku bangsa, seperti Aceh, Banjar, Batak, Bugis, Jawa, Minang, Sunda dan Tionghoa.

Pembangunan daerah tentunya juga tidak luput dari dana yang dimiliki daerah itu sendiri. Perkembangan pembangunan Kota Bengkalis sejalan lurus dengan jumlah dana pembangunan yang turun. Pada awal reformasi (1997-1998) dana yang diterima sebanyak Rp. 137.890.778, dan yang diterima naik terus menerus sampai dengan 4.47 M di tahun 2008. Di tahun 2020 dana pembangunan yang diperoleh sebesar 3.15 T.

Berdasarkan jumlah penerimaan uang setiap tahun Kabupaten mendapatkan dana yang cukup besar, guna menunjang pembangunan daerah maupun kemaslahatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah No 22 Tahun 1999, maka pemasukan anggaran daerah pasca reformasi naik 10 kali lipat dari tahun 1997 prareformasi. Dengan adanya anggaran besar, maka dimulailah pembangunan struktur kota baik dalam sektor industri migas, sektor perairan, sektor pakan dan peternakan, sektor pembangunan dan lain sebagainya.

Secara lebih rinci kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan Kota Bengkalis pada tahun 1998-2020 dikelompokkan berdasarkan periode kepemimpinan. Pada 22 tahun terakhir Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh lima orang pemimpin.

Tahun	Nama Bupati
1995-2000	H. Fadlah Sulaiman, S.H
2000-2005	Drs. H. Syamsurizal., SE., MM
2005-2010	Drs. H. Syamsurizal., SE., MM
2010-2015	H. Herliyan Saleh
2016-2020	Amril Mukminin

Tabel 1. Daftar Bupati Bengkalis (1998-2020)

A. Peride I (1998-2002)

Tahun 1998 adalah tahun paling penting di Indonesia, terutama di Kota Bengkalis. Pada masa itu Bengkalis di pimpin oleh Bupati Alm. H. Fadlah Sulaiman. Namun perkembangan ekonomi Kota Bengkalis belumlah stabil seperti yang diharapkan, dikarenakan masa transisi antara orde baru dengan reformasi terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian utama sebagai hal-hal yang harus di Kota Bengkalis terutama tata kota, ekonomi, sosial dan pendidikan. Pada tahun 2001 setelah disahkan UU Otonomi daerah dan atas kebijakan bapak Bapak Bupati Syamsurizal, Bengkalis mulai membangun segala macam fasilitas yang yang dapat menunjang mobilitas dan stabilitas daerahnya. Bapak Bupati Syamsurizal sendiri dikenal sebagai bapak pembangunan Bengkalis, hal ini karena pada masa jabatannya keuangan daerah yang diolah sendiri oleh daerah dan tidak ada campur tangan pemerintah pusat.

B. Peride II (2003-2007)

Ketika APBD masuk ke kantong kas daerah, Kota Bengkalis mulai membangun sarana dan prasarana penunjang mobilitas dan perekonomian masyarakat, seperti membangun jalan, pelabuhan, sekolah dan perkantoran guna mempermudah akses

keperintahan telah diresmikannya pelabuhan Bandar Sri Laksamana yang melayani rute dalam negeri dari Kota Bengkulu ke Dumai, Pekanbaru, Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang.

C. Periode III (2008-2012)

Periode III atau tahun 2008-2012 memiliki kualitas layanan kesehatan yang ditentukan oleh berbagai indikator yang sesuai. Hal ini dikarenakan aspek kesehatan adalah hal yang sangat penting, krusial dan juga sebagai bentuk dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

D. Periode IV (2013-2017)

Tahun 2013-2015 di Kecamatan Bengkulu mulai dijalankan proyek Multiyears atau proyek yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana APBN. Pembangunan jalan lingkar berfungsi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dalam kota, antar kota, dan lokal atau daerah pinggiran kota. Pendidikan pada periode IV mulai berkembang maju. Pada tahun 2015 STAI Bengkulu mulai diresmikan menjadi negeri atau bernama STAIN Bengkulu yang dimana peminat dari kampus melayu ini setiap tahunnya semakin banyak.

E. Periode V (2018-2020)

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bengkulu pada tahun 2018-2020 mengalami menurun. Penurunan ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dengan cara memberikan program bantuan seperti BLT

(Bantuan Langsung Tunai) melalui dana desa yang dikucurkan langsung pemerintah desa langsung. Selain itu juga ada bantuanbantuan yang dilakukan pemerintah daerah seperti memberikan bantuan seperti beras otonom, dan sembako murah.

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PERKEMBANGAN KOTA BENGKALIS TAHUN 1998-2020

A. Faktor Pendorong Perkembangan Kota Bengkulu Tahun 1998-2020

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor krusial dalam menentukan perkembangan suatu daerah, baik itu desa, kota, kabupaten, provinsi bahkan suatu negara. Faktor ekonomi ini sendiri sangat menentukan apakah disuatu daerah tersebut berkembang atau tidak nya, bisa mengelola keuangan dengan baik atau tidaknya. Terkhususkan Kota Bengkulu, bisa dikatakan sebagai kota yang berkembang dengan baik dari aspek ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu, antara lain:

1) Infrastruktur

Adanya UU Otonomi Daerah Kabupaten Bengkulu bisa membangun infrastruktur guna menunjang aktivitas kegiatan ekonomi. Karena semakin bagus infrastrukturnya, maka semakin rendah biaya produksi yang dikeluarkan sektor industry. Infrastruktur yang dibangun diantaranya jalan lingkar, dan pelabuhan Roro yang menghubungkan kecamatan di Pulau Bengkulu ke Kecamatan Bukit Batu yang berada di pinggiran Pulau Sumatera. Selain menunjang perekonomian, infrastruktur juga mampu membuat sistem

pemerintahan di Kota Bengkalis semakin maju, dan berkembang dengan baik.

2) Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Di daerah Kota Bengkalis, dengan SDM yang berlimpah dan berpendidikan dan terampil akan berguna untuk mendorong produktivitas bisnis UKM, jika banyak bisnis yang berkembang maka tentu saja pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sumber Daya Alam dapat membuat perubahan ekonomi disuatu daerah, untuk Kota Bengkalis sendiri Sumber daya alam yang terlihat adalah dari lautan, karena Kota Bengkalis terletak dipesisir selatan Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang dapat menghasilkan komoditas laut yang berlimpah

3) Faktor Sosial

Faktor sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan di Kota Bengkalis. Terjalannya kontak antar etnis dapat menjadi pertukaran informasi, kebiasaan dan budaya yang akan dapat membuat keragaman masyarakat. Selain itu juga dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama warga masyarakat. Agar dalam lingkungan yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan ideologi bisa memunculkan toleransi tinggi dan menurunkan konflik yang mendorong perubahan sosial.

FAKTOR PENDORONG PERKEMBANGAN KOTA BENGKALIS TAHUN 1998-2020

Administrasi pemerintahan disuatu kota tidak terlepas dari tantangan dan hambatan, salah satunya di Kota Bengkalis. Faktor penghambat ini juga bertujuan agar Pemerintah Kota Bengkalis terus berbenah dan terus berkembang, adapun faktor penghambat perkembangan Kota Bengkalis, antara lain:

A. Faktor Lahan

Lahan di Bengkalis yang didominasi oleh tanah gambut yang mengecil dan dikelilingi lumpur kawasan mangrove didominasi oleh hutan bakau, api-api dan nipah. Hal ini membuat lahan pertanian kurang subur karena berdekatan dengan laut. Air di Bengkalis menjadi Payau dan ada sebagian tanah di Bengkalis yang bersifat asam yang mengakibatkan petani sering gagal panen karena pertumbuhan tanaman akan terganggu.

B. Jumlah Penduduk

Sumber Daya Manusia (SDM) di Bengkalis bisa dikatakan cukup banyak, akan tetapi SDM ini tidak cukup mumpuni untuk bersaing di dunia pekerjaan. Hal ini karena jumlah penduduk disetiap tahunnya semakin banyak dan padat, dan juga banyak para pendatang dari daerah lain yang ingin mengadu nasib di Bengkalis, karena menganggap Bengkalis adalah kota yang maju. Lahan pekerjaan semakin sedikit.

C. Akses Keluar-Masuk

Lokasi Kota Bengkalis yang berada di Pulau Bengkalis, akses keluar masuk Kota

Bengkalis yang hanya bisa diakses melalui pelabuhan yang merupakan pintu gerbang untuk prasarana penghubung antar daerah sekitar Pulau Bengkulu, bahkan antar negara yaitu Indonesia-Malaysia. Jika pelabuhan ini mengalami kendala seperti kerusakan teknis baik human eror atau machine error hal ini dapat menghambat segala macam aktifitas seperti, terhambatnya aktivitas distribusi ekonomi yang dapat membuat aktivitas masyarakat Kota Bengkulu hanya berjalan ditempat.

KESIMPULAN

Awal reformasi Kecamatan Bengkulu masih tertinggal. Namun setelah adanya Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999 untuk mengurus rumah tangga sendiri Kecamatan Bengkulu mulai berkembang. Jumlah transfer dana yang besar dari daerah pusat juga mendukung pembangunan daerah. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Bengkulu leluasa membangun dan mengembangkan Kota Bengkulu dari segala macam aspek, baik aspek ekonomi, sosial dan pendidikan tanpa ada batasan dari pemerintah pusat.

Jumlah penduduk ditahun 1998-2020 terus bertambah. Secara sosial penduduk hidup dengan rukun dan damai, secara ekonomi keadaan semakin membaik terlebih karena adanya bantuan. Dalam bidang pendidikan juga membaik, pada tahun-tahun ini dibangun banyak sekolah negeri maupun swasta serta beberapa perguruan tinggi.

Faktor pendorong pembangunan di Kecamatan Bengkulu adalah keluarnya UU mengenai otonomi daerah pada tahun 1999, serta dana yang diterima semakin membaik.

Faktor penghambatnya adalah pintu keluar-masuk atau Gateway hanya ada 1 cara yaitu dengan jalur laut menggunakan kapal baik kapal ferry penyeberangan Roro Bengkulu, ferry cepat di pelabuhan Bandar Sri Laksamana untuk menyeberang ke pulau lain sekitar, Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja untuk menyeberang antar negara yaitu Indonesia dan Malaysia dan pelabuhan tikus lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu. (2002). Bengkulu Dalam Angka 2002. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu.
- Gusri, S. (2005). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu di Era Otonomi. In Pascasarjana IPB. IPB (Bogor Agricultural University).
- Lazuardy, A., & Rahmani, N. (2018). Permasalahan Tarif Masuk Pelabuhan Bengkulu. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 05(02), 129–130.
- Pemkab Bengkulu. (2011). Bandar Sri Setia Raja. Website Resmi Kabupaten Bengkulu. <https://www.bengkalis.kab.go.id/view/news/bandar-sri-setia-raja-difungsikan>
- Pemprov Riau. (2021). Website Resmi Pemerintah Provinsi Riau. Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau; Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau. <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>
- Sedyawati, E. (1994). Kosakata Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Melayu Masa Kini. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Suparno, B. A. (2012). Reformasi & Jatuhnya Soeharto. PT Kompas Media Nusantara.
- Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan. Magnum Pustaka Utama.